

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2014-2018

Ni Made Susanti Dewantari¹

Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the management of the regional income and expenditure budget (APBD) in Denpasar in terms of the government's financial ratios from 2014-2018. The data used in this study is the 2014-2018 Denpasar City budget data. The data collection technique is with documentation and interviews conducted in the city of Denpasar. The method used is comparative descriptive using several financial ratios. The results showed that based on the analysis of income variance, expenditure variance, and the ratio of independence in 2014-2015 said to be quite good, where the intent of the pattern of relationships between interference from the central government began to decrease. The ratio of effectiveness and efficiency ratio of PAD expenditure is said to be very effective and efficient in realizing regional taxes and levies. The ratio of routine expenditure to capital expenditure is said to be quite good. While the ratio of income and expenditure growth is said to be not good because there is a significant decrease and increase.

Keywords : APBD Management Performance, Analysis of Income Variance, Expenditure Variance, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Spending Harmony Ratio, Spending Efficiency Ratio and Growth Ratio.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perencanaan keuangan tahunan pada pemerintah daerah yang diputuskan bersama pemerintahan daerah dan DPRD, serta ditetapkan pada peraturan daerah (Sutaryo, Sutopo, dan Wijaya, 2014). Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yaitu undang-undang yang mengatur terkait tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Dalam pemberlakuan otonomi daerah pemerintah daerah mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dana maupun kekayaan lainnya (Adi, 2012).

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan sesuai ketepatan waktu sehingga kegiatan program dan pembangunan yang telah direncanakan terealisasi pada tahun anggaran, sehingga dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar (keuda.kemendagri.go.id, Agustus 2013).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah dan pembiayaan daerah. Maka dengan demikian anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah serta dapat melindungi kesinambungan pembangunan dalam mengoptimalkan tingkat hidup masyarakat. Anggaran ini sangat wajib sebab terdapat kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan seterusnya berkembang.

Dalam hal ini peneliti mengangkat di daerah kota Denpasar karena ada fenomena yang terjadi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu terjadinya penumpukan realisasi terhadap belanja daerah pada tahun sebelumnya, maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah Pada tahun selanjutnya Pemerintah Kota Denpasar sudah mampu memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran atau belum, dan setelah di teliti pemerintah Kota Denpasar sudah memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran dan tidak ada penumpukan realisasi kembali.

Namun demikian di pemerintah daerah Kota Denpasar dapat dilihat belum mampu sepenuhnya dapat mengukur persentase anggaran yang memenuhi kriteria penilaian yang cukup baik. Anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar secara umum mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana terdapat selisih antara anggaran dengan yang direalisasikan. Secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Denpasar mengalami peningkatan dan penurunan serta terdapat selisih yang rutin setiap tahunnya.

Peneliti mengangkat topik ini karena terdapat pembelajaran mengenai rasio-rasio pengukuran penilaian kinerja di suatu instansi pemerintah agar mengetahui

sebagaimana tata kelola dari pemerintah Kota Denpasar sudahkah masuk ke dalam kriteria baik ataukah masih kurang dalam suatu penelitian pengelolaan anggaran. Maka dari itu perlu adanya penjabaran suatu penilaian kriteria kinerja pengelolaan anggaran yang dapat menjadi acuan dan pembelajaran agar persentase keuangan yang diukur nantinya dapat dilihat secara transparan berdasarkan pengukuran setiap tahunnya.

Lemahnya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dapat diukur menggunakan pengukuran penilaian kinerja rasio-rasio keuangan. fenomena tersebut menarik dalam pembahasan serta dikaji kembali secara lebih akurat terkait pengukuran persentase kinerja keuangan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Denpasar. Maka dari itu pengukuran rasio keuangan daerah sangatlah penting dalam suatu pengelolaan anggaran yang nantinya dapat dilihat dari sistem kinerja pemerintah daerah agar dapat dikatakan baik atau tidaknya dalam mengelola suatu anggaran di daerah Kota Denpasar.

Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar tidak mengukur kinerja suatu keuangan. Namun yang berhak mengukur kinerja pengelolaan anggaran pemerintah dan menilai suatu kinerja keuangan di periksa oleh Audit BPK. Audit BPK lah yang mengetahui sebagaimana pemerintah tersebut mengelola suatu anggaran yang baik.

Perbedaan diantara penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, penggabungan hasil penelitian empat peneliti pada waktu yang lalu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015-2019”. Pada penelitian ini peneliti mengubah tahun penelitian yang sebelumnya dari tahun 2015-2019 menjadi tahun 2014-2018 karena pada tahun 2019 data penelitian belum dapat di teliti sebelum pemeriksaan Audit BPK selesai. Dengan demikian

peneliti mengajukan kembali terkait tahun anggaran yang dirubah dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2014-2018 berdasarkan analisis varians pendapatan, analisis varians belanja, rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio pertumbuhan?"

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2014-2018 berdasarkan analisis varians pendapatan, analisis varians belanja, rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan Memperluas pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah dalam suatu organisasi sektor publik serta dapat menambah daftar pustaka di lingkungan akademis sebagai referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pihak pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Pembelajaran Pengelolaan (Stewardship Theory) yang menjabarkan penelitian tersebut merupakan hasil dari agensi teori yaitu stewardship theory. Donaldson et al.(1997). Teori ini mempelajari situasi tentang manajemen tidaklah termotivasi untuk tujuan perseorangan tetapi lebih tertuju pada sebuah hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengartikan ada hubungan yang baik antar kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi mewujudkan dan memaksimalkan kegunaan kelompok principals serta manajemen.

Manajemen pemerintah dituntut melaksanakan pelayanan bagi kepentingan utama. Maka dari itu manajemen di lingkungan pemerintah yang dominan bertindak sebagai pelayanan dibandingkan sebagai agent. Penelitian ini didukung oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Dalam hasil penelitiannya Morgan et al.(1996) menggambarkan terkait pemerintah daerah lebih banyak bersikap sebagai bawahan dari pada agent yang mengakibatkan pekerjaan dalam organisasi dapat ditingkatkan. Dalam hasil penelitian Van Slyke (2006) menunjukkan bahwa manajemen pemerintah lebih berpusat sert sebagai steward karena terpengaruh oleh jenis layanan yang disampaikan, tingkat kemampuan manajemen pemerintah, jenis insentif serta sanksi yang diberikan. Berdasarkan pengamatan diatas, maka sangat penting diterapkan. dalam penelitian organisasi khususnya bagi pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran adalah suatu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan,menjamin kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran perlu karena ada kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang,tetapi sumber daya yang ada sangat terbatas. Anggaran perlu sebab ada masalah keterbatasan sumberdaya

(Halim dan Muhammad Iqbal, 2012:164)

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah yaitu pendapatan yang diperkirakan dan terukur secara rasional serta dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
2. Belanja Daerah yaitu kewajiban daerah yang disetujui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih per periode tahun anggaran tersebut
3. Pembiayaan Daerah yaitu semua transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pemasukan dan pengeluaran, dan perlu dibayar atau diterima kembali, serta dalam penganggaran pemerintah daerah yang utama dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan anggaran surplus

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bastian (2006:273), “Kinerja merupakan sebuah gambar dalam mencapai pelaksanaan suatu program untuk terwujudkan suatu target, tujuan., misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mencari khaskan tingkat capaian suatu sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan indikator pemasukan, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. Analisis kinerja dilakukan dengan menilai informasi finansial serta dapat menggunakan beberapa rasio keuangan

Penelitian Sebelumnya

Sebagai Acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu :

1. Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan (2016)

Dalam penelitian “ Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provinsi sumatera utara” Hasilnya menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanja tahun 2010-2013

disebutkan baik serta pertumbuhan pendapatan dibidang cukup baik. tahun 2010-2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada rasio kemandirian keuangan disebutkan cukup baik.

2. Alfred Labi (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015 hasil penelitian yang menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013-2015 belum menunjukkan angka yang sangat baik, bahwa proporsi pendapatan serta komponen dana perimbangan transfer dari pemerintah pusat masih menduduki posisi atau persentasi yang sangat bagus, meski dari per tahun mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, lalu untuk komponen Pendapatan asli daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah masih menempati persentasi yang sangat rendah.

3. Marchelino Daling (2013)

Tujuan penelitian ini agar mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan belum bagus, hal tersebut diliat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja daerah.

4. Bonilisa Rantebalik, Tawakkal, Anna Sutrisna S (2016)

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tana Toraja selama periode 2010 sampai 2014. Hasil penelitiannya di katakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemerintah Lokal selama periode 2010 sampai 2014 umumnya dikatakan cukup baik. Berdasarkan pendekatan kinerja anggaran penerimaan baik dengan pertumbuhan pendapatan positif dan pendapatan asli daerah

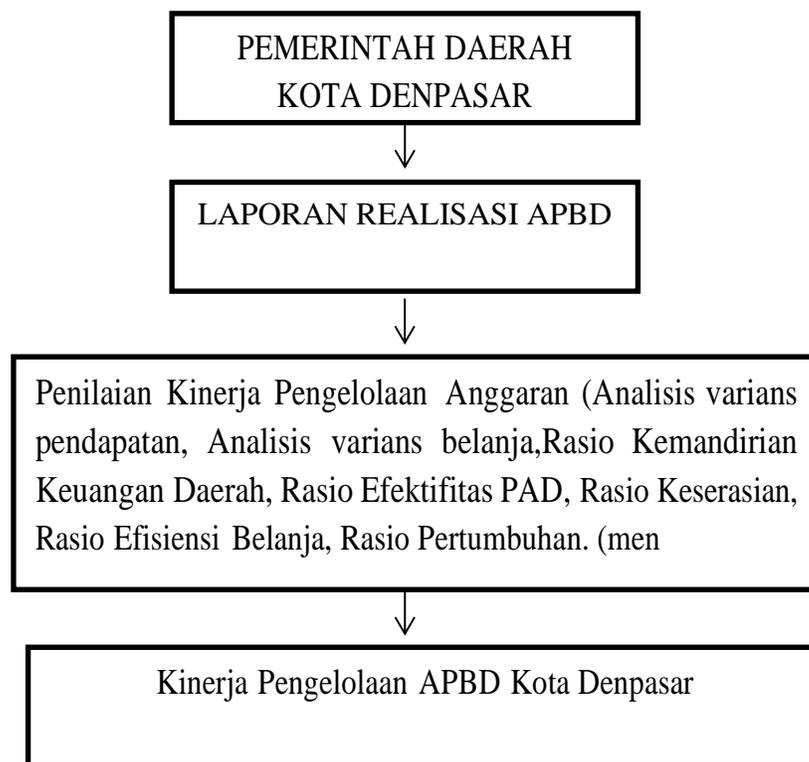
selama periode 2010 sampai 2014 dapat disadari jika lebih dari harapan yang tercakup dalam anggaran. Kinerja anggaran berdasarkan pendekatan pengeluaran, ada beberapa program yang tidak terealisasi maksimal, disamping itu alokasi penggunaan anggaran terfokus pada kegiatan

METODELOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Gambar 3.1

Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2014-2018



Sumber : Data diolah, 2020.

Dalam desain penelitian ini dimaksudkan dengan Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dalam menganalisis laporan

realisasi APBD dengan menggunakan analisis dan rasio dalam menilai kinerja pengelolaan APBD.

Teknik Analisis Data

Analisis Varians Pendapatan

Analisis *varians* pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Dalam prinsip anggaran pendapatan batas minimum total pendapatan yang di jadikan target harus diperoleh oleh pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja pendapatan yang bagus ketika dapat mendapatkan pendapatan yang lebih dari jumlah yang dianggarkannya. jika realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkannya, maka hal tersebut dinilai kurang bagus. (Halim, 2002:127-130). Adapun rumus dari analisis pendapatan yaitu :

$$\text{Varians pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Analisis Varians Belanja

Analisis *varians* belanja ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Dalam kinerja pengelolaan, pemerintah daerah dinilai bagus ketika realisasi belanja lebih minim dari apa yang dianggarkannya, apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal tersebut mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang bagus. (Halim,2002:127-130). Adapun rumus varian belanja yaitu :

$$\text{Varians belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian keuangan

Dalam rasio kemandirian menjelaskan keterikatan daerah terhadap sumber dana dari pihak luar. Semakin besar rasio kemandirian termuat arti bahwa tingkat keterikatan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian

pula sebaliknya. (Halim,2002:127-130).

Rasio ini dapat dirumuskan yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tabel, 3.1

KRITERIA RASIO
 KEMANDIRIAN
 KEUANGAN.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali.	0% - 25%.	Instruktif.
Rendah.	25% - 50%.	Konsultatif.
Sedang.	50% - 75%.	Partisipasif.
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Abdul Halim, (2007)

- a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintahan pusat selalu dominan dari pada kemandirian Pemerintahan Daerah.
- b) Pola Hubungan Konsultatif, pola ini terdapat kerjasama pemerintahan pusat yang sudah mulai berkurang, sebab daerah telah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat sudah berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian telah mendekati pelaksanaan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif yaitu kerjasama pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar mampu mandiri dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menjabarkan keahlian pemerintahan daerah dalam melakukan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil pemerintah daerah. Keahlian daerah sudah dikatakan efektif bilamana rasio yang mencapai minimal 1/100 persen. Tetapi semakin besar rasio efektifitas mewujudkan kemampuan daerah yang semakin besar. (Halim, 2002:127-130).

Rasio efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tabel 3.2
KRITERIA EFEKTIVITAS
PAD

base Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %.	Sangat efektif.
100%.	Efektif.
90% - 99%.	Cukup Efektif.
75% - 89%.	Kurang Efektif.
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143).

Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja daerah menjabarkan bagaimanakah pemerintahan daerah dalam mengutamakan alokasi dana pada belanja sehari-hari dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar persentase dana yang dianggarkan

untuk belanja sehari-hari berarti persentase belanja investasi yang di pergunakan sebagai sarana-sarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Halim, 2002:131)

Rasio keserasian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. (Halim, 2002:131)

- a. Rasio belanja rutin/operasi $= \frac{\text{Belanja Rutin/operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
- b. Rasio Belanja Modal $= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 164), rasio efisiensi belanja ini merupakan memperbandingkan antara realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah. Manfaat Rasio ini sebagai pengukur tingkat kehematan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemeritahan daerah dinilai jika telah melaksanakan efisiensi anggaran ketika rasio efisiensi kurang dari 100 persen lalu lebih dari 100 persen maka menggambarkan terjadinya pemborosan terhadap anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%.$$

Tabel 3.3

KRITERIA EFISIENSI BELANJA

Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Lebih dari 100%.	Tidak Efisien.
Kurang dari 100 %.	Efisien.

Sumber : Mahmudi (2016:164).

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan yaitu rasio untuk menilai seberapa tinggi keahlian

pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah ditargetkan dari periode selanjutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan untuk komponen masing-masing sumber pendapatan serta pengeluaran, yang dapat dukungan (Halim, 2002:135)

Manfaat rasio ini yaitu untuk melihat apakah pemerintahan daerah pada anggaran tahun yang bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentu berharap pertumbuhan pendapatan secara baik dan kecenderungan meningkat. Lali jika terjadinya pertumbuhan yang tidak baik, maka hal itu tersebut menggambarkan terjadi penurunan suatu Kinerja

Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut :

- a) Persentase Pertumbuhan total pendapatan.:

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } p, - \text{Pendapatan Tahun } p-1}{\text{Pendapatan Tahun } p-1} \times 100$$

- b) Persentase Pertumbuhan belanja daerah

$$\frac{\text{Belanja daerah Tahun } p, - \text{Belanja daerah Tahun } p-1}{\text{Belanja tahun } p-1} \times 100$$

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tabel 4.1.

Hasil Rasio Analisis Varians Pendapatan.

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2014	1,687,453,633,925	1,727,968,712,800	102
2015	1,820,251,600,245	1,786,400,782,070	98
2016	1,882,852,410,384	1,943,164,609,042	103
2017	2,045,752,381,769	2,058,136,261,219	101
2018	2,607,764,870,633	2,121,040,458,231	81

Sumber : Lampiran 1

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan analisis varians pendapatan, secara umum dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan Kota Denpasar pada tahun 2014,2016,dan 2017 dikatakan sudah baik karena dalam tabel diatas realisasi sudah mampu melebihi target sedangkan pada tahun 2015 dan 2018 masih dikatakan belum mampu melebihi target yang dianggarkan sehingga 2 tahun tersebut belum dikatakan sangat baik. Dalam analisis varians pendapatan persentase pengukuran kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Tabel 4.2
Hasil Rasio Analisis Varians Belanja

TAHUN	GET	REALISASI	%
2014	84,774,157,744	,378,768,626	87
2015	87,906,646	,159,731,371	86
2016	74,205,062	,628,687,354	91
2017	83,206,906	,311,318,271	86
2018	85,949,986	,199,898,487	88

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan analisis varians belanja tahun anggaran 2014-2018 sudah dikatakan cukup baik, karena tidak melebihi anggaran yang telah dianggarkan. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan yang cukup ketat dalam mengelola anggaran belanja agar tidak melebihi target yang dianggarkan, sehingga kinerja pemerintah di Kota Denpasar dinilai baik jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan.

Tabel 4.3
Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	
2014	98,739,758,265	,968,712,800	40
2015	214,148,513	,400,782,070	43
2016	042,113,054	,164,609,042	42
2017	710,711,670	,136,261,219	49
2018	110,334,564	,040,458,231	44

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan dari tabel diatas tabel 4.3 untuk rasio kemandirian keuangan daerah pemerintahan Kota Denpasar yang dihitung dalam lima Tahun Terakhir, dimana dari tahun 2014-2018 rasio kemandirian di tahun 2014 sebesar 40% yang termasuk kedalam kriteria rendah dan juga termasuk kedalam pola hubungan konsultatif sebab berada diantara 25%-50%. Untuk tahun 2015-2018, rasio kemandirian ini mengalami peningkatan dan penurunan dimana rasio kemandirian tetap berada di kriteria rendah dan termasuk juga kedalam pola hubungan konsultatif karena masih berada diantara 25%-50 %. maksud dari pola konsultatif ini yaitu pola hubungan antar campur tangan pemerintahan pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

Tabel 4.4
Hasil Rasio Efektivitas PAD

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2014	644,117,977,749	698,739,758,265	108
2015	724,497,965,131	776,214,148,513	107
2016	740,366,097,386	807,042,113,054	109
2017	932,703,422,712	1,008,710,711,670	108
2018	855,076,706,456	940,110,334,564	110

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.4 rasio efektivitas pada tahun anggaran 2014-2018 sudah dikategorikan sudah sangat efektif walaupun ada beberapa tahun mengalami penurunan, tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena masih berada pada tingkat rasio lebih dari 100% berdasarkan kriteria penilaian rasio efektivitas. Hal ini dipengaruhi oleh tercapainya hampir semua target sumber PAD yang utama yaitu pajak

daerah, retribusi daerah dan lain –lain PAD yang disahkan mampu terealisasi melebihi anggaran yang ditetapkan.

Tabel 4.5
Hasil Rasio Keserasian Belanja

a. Belanja Rutin/Operasi

TAHUN	BELANJA OPERASI	TOTAL BELANJA	%
2014	268,397,095	,334,768,626	86
2015	760,217,521	,159,731,371	88
2016	205,469,503	,628,687,354	84
2017	029,617,680	,311,318,271	47
2018	596,082,079	,199,898,487	86

Sumber : Lampiran 5

b. Belanja Modal

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	%
2014	041,721,656	,334,768,626	14
2015	319,520,759	,159,731,371	12
2016	667,927,152	,628,687,354	15
2017	281,700,591	,311,318,271	53
2018	408,656,629	,199,898,487	14

Sumber : Lampiran 5

Rasio Keserasian ini dibagi menjadi 2 yaitu rasio belanja operasi serta belanja modal. Rasio belanja operasi ini pemerintah Kota Denpasar dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sedangkan dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan, dan tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Sedangkan di belanja modal dari tahun 2015 dan 2018 rasio belanja modal mengalami penurunan, dan dari tahun 2014,2016 dan 2017 mengalami peningkatan.

Dari uraian diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil. Rasio belanja operasi ini masih sangat tinggi dibandingkan rasio belanja

modal tersebut. tingginya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relative besar, pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan lebih banyak dan belum juga memperhatikan pembangunan daerah. sedangkan pada tahun 2017 total belanja modal lebih besar dibandingkan belanja operasi dikarenakan belanja modal lebih banyak dialokasikan untuk biaya barang dan jasa.

Tabel 4.6
Hasil Rasio Efisiensi Belanja

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2014	,730,157,744	9,334,768,626	87
2015	,687,906,646	2,159,731,371	86
2016	,674,205,062	4,628,687,354	91
2017	,383,206,906	7,311,318,271	86
2018	,385,949,986	0,199,898,487	88

Sumber : Lampiran 6

Dari tabel diatas rasio efisiensi belanja pemerintah Kota Denpasar dari tahun 2014-2018 berdasarkan kriteria efisiensi dapat dikatakan efisien karena persentase masih berada dibawah 100% dalam melakukan realisasi belanjanya. pemerintah Kota Denpasar mampu mengefisiensikan belanja daerah sehingga realisasi tidak melebihi target yang dianggarkan.

Tabel 4.7
Hasil Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

PENDAPATAN			
TAHUN	TAHUN P	TAHUN P-1	%
2014	27,968,712,800	25,213,107	11.65
2015	86,400,782,070	27,968,712,800	3.38
2016	43,164,609,042	86,400,782,070	8.78
2017	58,136,261,219	43,164,609,042	5.92
2018	21,040,458,231	58,136,261,219	3.06

Sumber : Lampiran 7

Dilihat dari tabel 4.7 dapat dilihat dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan peningkatan, ditahun 2016 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,78%. Dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintahan Kota Denpasar untuk tahun dan tahun selanjutnya mengalami penurunan yang sangat drastis, sebabnya kurang memaksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Denpasar. Pertumbuhan pendapatan ini dinilai baik apabila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Apabila pertumbuhan negatif hal ini membuktikan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Dalam pertumbuhan pendapatan ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah Kota Denpasar tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya.

Tabel 4.8
Hasil Rasio Pertumbuhan

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

BELANJA			
TAHUN	TAHUN P	TAHUN P-1	%
2014	78,768,626	89,625,295	8.71
2015	59,731,371	78,768,626	4.02
2016	28,687,354	59,731,371	6.48
2017	11,318,271	28,687,354	16.78
2018	99,898,487	11,318,271	3.41

Sumber : Lampiran 7

Dilihat dari tabel 4.8 dapat dilihat dari tahun 2014 sebesar 8,71%. Pada tahun 2015 pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar 4.02%, ditahun 2016 mengaami peningkatan sebesar 6,48, sedangkan ditahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 16,78 sedangkan ditahun 2018 angka persentase pertumbuhan belanja mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga rasio pertumbuhan belanja dikatakan positif apabila mengalami peningkatan, pada tabel pertumbuhan ini persentase dari tahun ke tahun cenderung menunjukan nilai persentase yang negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan analisa, maka dapat ditemukan tolak ukur dari kinerja keuangan pemerintahan dalam pengelolaa keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan Anggaran sehingga dapat ditarik kesimpulannya, apabila dilihat dari analisis varian pendapatan, analisis varian belanja, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio pertumbuhan, maka pengelolaan keuangan di Kota Denpasar menunjukkan nilai persentase yang cukup

baik, tetapi pada analisa persentase rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja pada pemerintah Kota Denpasar menunjukkan hasil yang kurang baik. Ini menyebabkan pemerintah Kota Denpasar belum mampu sepenuhnya mengelola anggaran secara baik, karena masih ada beberapa rasio yang belum memenuhi kriteria penganggaran yang baik, sehingga kedepannya diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam suatu proses pengelolaan anggaran berdasarkan kriteria pengukuran rasio masing-masing sebelum diaudit oleh BPK.

Berdasarkan uraian diatas, saran yang dapat diberikan pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah antara lain yaitu :

1. Menjaga tingkat keefektifitas serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah kota Denpasar harus tetap lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
2. Optimalisasi perolehan PAD melalui penggalian sumber baru untuk penerimaan daerah kendati jumlah bantuan dana dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi masih cukup besar.
3. Memperbesar alokasi Belanja Modal yang dapat berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi serta untuk layanan publik agar dapat semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah Kota Denpasar

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Labi, 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran*. E-Jurnal Akuntansi.
- Bonilisa Rantebalik, Tawakkal, Ana Sutrisna . 2016. *Analisis Kinerja Pelaksanaan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten*

- Tana Toraja.. E-Jurnal Akuntansi.*
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Donaldson, L, & Davis, J. H. 1997. *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management.*
- Elizar Sinambela, Kiki Rizki dan Ana Pohan.2016. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. E-Jurnal Akuntansi.*
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
_____, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat.Jakarta
_____, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat.Jakarta
- Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Marchelino Daling, 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. E-Jurnal Akuntansi.*
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YPKN Yogyakarta.
- _____, 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyawati, Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2.Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi